Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam
P-ISSN : 2621-0312
E-ISSN : 2657-1560
Vol. 8, No. 1 Tahun 2025
DOI : http://dx.doi.org/10.21043/politea.v8i1.30966

Pemahaman Komunitas Gusdurian Surakarta Tentang Etika Politik Gus Dur

Muhammad Fiam Setyawan
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia
Email: fiamsetiawan24@gmail.com

Khoirunnisa Salsabila
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia
Email: ksnisaa@gmail.com

Submitted: February 9th, 2025
Revised: August 3th, 2025
Accepted: August 11th, 2025

Abstract
The world of politics in Indonesia today is often associated with corruption, bribery, and abuse of authority. Then it needs a theoretical study to serve as a guide in politics, especially in terms of ethics. With this, Gus Dur has contributed his thoughts on political ethics. After Gus Dur died, Gusdurian was present as Gus Dur's ideological child to continue Gus Dur's struggles. From here the question arises, how does the Gusdurian community understand Gus Dur's political ethics? And what is their role in trying to spread it? However, this research will focus on a smaller scope, where Surakarta is the object of research. Why Surakarta? Because Surakarta as a small city has interesting political dynamics, from the political situation and the plurality of its people. In addition, the purpose of this research is to find out how the understanding of the Gusdurian activists as a vehicle for implementing Gus Dur's political ethics thinking. This research is a field research. Data were obtained from interviews conducted with the Gusdurian Surakarta community mobilizers and observations in every activity of this community. The results of this study found that Gusdurian Surakarta activists fully understand Gus Dur's concept of political ethics which includes three important aspects, namely justice, humanity, and the establishment of democracy. This community also moves concretely in an effort to spread Gus Dur's political ethics through conventional activities, attitudes towards political problems in Surakarta, and collaboration with various other organizations in Surakarta.
Keywords: Ethics, Politics, Gus Dur, Gusdurian, Surakarta

Abstrak
Dunia politik di Indonesia saat ini sering dikaitkan dengan korupsi, penyuapan, dan penyalahgunaan wewenang. Maka dibutuhkan sebuah kajian teoritis yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam berpolitik, terutama dalam hal etika. Dengan ini, Gus Dur telah menyumbangkan pemikirannya tentang etika politik. Setelah Gus Dur wafat, Gusdurian hadir sebagai anak ideologis Gus Dur untuk melanjutkan perjuangan Gus Dur. Dari sini muncul pertanyaan, bagaimana masyarakat Gusdurian memahami etika politik Gus Dur? apa peran mereka dalam upaya menyebarkannya?. Penelitian ini akan berfokus pada lingkup yang lebih kecil, di mana Surakarta menjadi objek penelitian. Sebagai kota kecil, Surakarta memiliki dinamika politik yang menarik khususnya situasi politik dan pluralitas masyarakatnya. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman para aktivis Gusdurian sebagai wahana implementasi pemikiran etika politik Gus Dur. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan para penggerak komunitas Gusdurian Surakarta dan observasi dalam setiap kegiatan komunitas. Hasil penelitian ini menemukan bahwa para aktivis Gusdurian Surakarta memahami sepenuhnya konsep etika politik Gus Dur yang mencakup tiga aspek penting, yaitu keadilan, kemanusiaan, dan penegakan demokrasi. Komunitas ini juga bergerak secara konkret dalam upaya menyebarkan etika politik Gus Dur melalui kegiatan-kegiatan konvensional, sikap terhadap permasalahan politik di Surakarta, dan kolaborasi dengan berbagai organisasi lain di Surakarta.
Kata Kunci: Etika, Politik, Gus Dur, Gusdurian, Surakarta

Pendahuluan

Kontrol terhadap kekuasaan menjadi peran penting bagi setiap warga negara. Karena setiap warga negara memiliki hak dalam menyuarakan pendapatnya. Oleh karena itu, dengan adanya sebuah komunitas, individu antar individu berkumpul dengan ide dan gagasan yang sama dalam menempuh sebuah tujuan. Pemahaman antar anggota juga harus betul-betul ditanamkan. Pemahaman akan ide dan gagasan yang baik akan menjadikan sebuah komunitas lebih konsisten dalam menggapai tujuan.

Apalagi ketika berbicara mengenai etika politik. Menurut I Made Kartika terjadinya sikap-sikap nir-etika dalam berpolitik disebabkan oleh ketidakpahaman dan ketidakmampuan masyarakat dalam memahami Pancasila sebagai konsep etika politik (Kartika, 2015). Selain itu, krisis moral, longgarnya kepercayaan dan pemahaman terhadap agama, serta hukum yang tidak tegas membuat kini terjadi banyak

problematika pada dunia politik di Indonesia. Oleh karena itu, penting rasanya ada sebuah gerakan dalam memantik kembali tentang pentingnya sebuah etika dalam berpolitik.

Masyarakat Indonesia hari ini akrab sekali dengan perbincangan mengenai dinamika politik yang tersebar luas di portal berita dan media sosial. Apalagi tentang kasus-kasus korupsi, suap-menyuap, dan cara berkuasa. Selaras dengan data yang disajikan oleh *Transparency International* (TI), Indonesia menempati peringkat 115 dari 180 negara pada tahun 2023 dengan indeks persepsi korupsi (IPK) 34/100. Tentu ini merupakan citra buruk bagi negara, apalagi hukum Indonesia belum berani melakukan penindakan tegas pada kasus-kasus korupsi. Buktinya dengan belum disahkannya RUU perampasan aset, dan minimnya hukuman tegas bagi para koruptor.

Berangkat dari problematika politik Indonesia, rasanya perlu meninjau kembali bagaimana prinsip etika yang dijalankan oleh para politisi. Politik harus dijalankan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, apalagi tentang soal etika (baik dan buruk). Karena jika politik dibiarkan liar tanpa etika, maka orientasinya hanya pada kekuasaan dan keuntunga pribadi maupun kelompok. Salah satu rujukan kongkrit tentang etika politik adalah lewat Abdurrahman Wahid, presiden ke-4, yang akrab disapa Gus Dur. Melalui gagasan dan aksinya, Gus Dur telah mewariskan tentang bagaimana seharusnya politik itu dijalankan.

Dengan terjun langsung untuk memimpin negara ini, Gus Dur menghadapi tantangan luar biasa dari dalam maupun luar karena prinsip politiknya. Dalam periode transisi dari pemerintahan otoriter menjadi demokrasi, Gus Dur memulai untuk menata ulang pemerintahan dengan berbagai kebijakan kontroversialnya, seperti pembubaran departemen penerangan dan departemen sosial, pencabutan TAP MPR no. 25 tahun 1966 tentang pelarangan partai komunis Indonesia (PKI), mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua dan memberikan hak kepada masyarakat Papua untuk mengibarkan bendera kejora asal tidak di atas bendera Indonesia, memberikan hak kepada umat

Tionghoa untuk merayakan hari besar, dan di ujung masa kepresidenannya ingin membubarkan DPR, walaupun tidak terlaksana (Utama, 2020).

Kebijakan kontroversial Gus dur dilandaskan pada prinsipnya bahwa manusia harus mengedepankan moralitas (kebaikan) dan kemanusiaan. Beliau tidak hanya dikenal sebagai Presiden, lebih dari itu, Gus dur adalah seorang Negarawan, Intelektual, dan Agamawan. Beliau terkenal atas aktivitasnya memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan di negeri ini. Oleh karena itu, tidak heran jika beliau ditokohkan oleh berbagai kalangan lintas generasi dan bahkan lintas agama.

Etika politik fokus berbicara mengenai hukum dan kekuasaan negara, tentang bagaimana baik dan buruknya. Prinsip etika politik secara umum bagi bangsa ini yang sudah tertuang dalam pancasila adalah adanya cita-cita the Rule of Law, partisipasi masyarakat, jaminan HAM sesuai dengan paham kemanusiaan, struktur kebudayaan, dan kondisi sosial masyarakat masing-masing (Pureklolon, 2020). Intinya, kebijakan pemerintah harus tegak lurus dengan kondisi sosial-masyarakat.

Setelah Gus Dur wafat pada tahun 2009, para akademisi-akademisi yang terpengaruh oleh Gus Dur merasa terpanggil untuk kembali memperjuangkan nilai-nilai perjuangan beliau. Oleh karena itu muncullah Gusdurian sebagai komunitas yang dapat dibilang sebagai anak ideologis Gus Dur. Komunitas ini bergerak secara aktif dalam ranah sosial kemasyarakatan, namun dengan tidak mengkesampingkan isu-isu krisis lain negara ini.

Dalam penelitian ini, fokus kajian akan dibatasi pada ruang geografis di Kota Surakarta. Karena pada pemilu 2024 Surakarta menjadi salah satu daerah rawan konflik. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Tengah, Haeruddin, ia menghimbau kepada masyarakat Surakarta untuk meningkatkan toleransi dalam menghargai pendapat (Kurniawan, 2023). Selain itu sejak PEMILU 2024 hingga hari ini Surakarta menjadi sorotan masyarakat Indonesia dengan berbagai liputan media mengenai kondisi politik di Surakarta. Ditambah lagi dengan hadirnya sosok Jokowi, sebagai Presiden ke-7 Indonesia yang hari ini bertempat tinggal di Solo. Dengan

itu, tentu saja banyak agenda-agenda politik di Surakarta yang bermuara pada Presiden Jokowi.

Untuk mempertimbangkan penelitian ini, maka perlu untuk meninjau ulang penelitian-penelitian terdahulu untuk menemukan celah penelitian baru. Oleh sebab itu peneliti mengumpulkan tiga penelitian terdahulu yang memiliki fokus pada kajian yang hampir sama dengan yang akan peneliti lakukan. Hal ini dilakukan untuk melihat pola penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Tesis pertama merupakan karya Ridho Firdaus yang berjudul "*Etika Berpolitik dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan Relevansi Perkembangan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*", tulisan ini membahas mengenai bagaimana etika berpolitik Gus Dur berhubungan dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menjelaskan bahwa Abdurrahman Wahid memiliki perspektif dan pemikiran unik tentang politik. Gus Dur tidak membedakan politik dari Islam karena dia percaya bahwa politik adalah bagian dari dunia yang harus diatur oleh moralitas (Firdaus, 2020). Yang membedakan karya ini dengan penelitian penulis adalah bahwa karya ini berfokus pada etika politik yang mempengaruhi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana etika politik Gus Dur dipahami oleh komunitas Gusdurian Surakarta dan digunakan untuk menjalankan kehidupan berdemokrasi.

Selanjutnya, skripsi karya Muammar yang berjudul "*Peran Komunitas Gusdurian dalam Menyebarkan Gagasan Toleransi Beragama di Kalangan Generasi Muda di Kota Makassar*", tulisan ini menggali tentang peran dari komunitas Gusdurian di Kota Makassar dalam menyebarkan toleransi dalam beragama di kalangan muda (Muammar, 2021). Sudah jelas bahwa ada perbedaan yang signifikan antara skripsi ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Perbedaan ini terletak pada konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang akan memeriksa gagasan tentang etika dalam berpolitik.

Terakhir, skripsi karya Idham Kholid Prabowo yang berjudul "*Peran Komunitas Jaringan Gusdurian Ciputat dalam Menjaga Toleransi serta Pluralisme*" didalamnya

menjelaskan mengenai peran yang dilakukan oleh komunitas jaringan Gudurian di Ciputat dalam menjaga toleransi dan pluralisme dengan bentuk kegiatan berupa Kelas Pemikiran Gus Dur (KGP), Haul Gus Dur, Forum Lintas Iman, Hari Toleransi Sedunia, dan Gusdurian Peduli (Prabowo, 2021). Hal yang membedakan penelitian ini ialah objek materialnya, dimana penulis akan meneliti tentang Gusdurian Surakarta, yang dimana pasti dalam segi pemikiran, dan sosio-geografis berbeda dengan yang ada di Ciputat.

Setelah menelaah beberapa kajian pustaka terdahulu, ditemukan peluang akan adanya penelitian ini. Dimana gagasan etika politik Gus Dur masih kurang menarik untuk dikaji lebih dalam karena sosok Gus Dur yang sangat lekat dengan gagasan pluralisme. Oleh adanya peluang tersebut, peneliti tidak hanya menginginkan membedah ulang pola pemikiran etika politik Gus Dur. Namun tentang bagaimana melihat komunitas yang mengatasnamakan anak ideologis Gus Dur dapat memahami pola pemikiran etika politik Gus Dur. Tentu ini sangat penting, mengingat visi daripada komunitas tersebut adalah memperjuangkan kembali nilai-nilai Gus Dur.

Lalu dengan beberapa kajian penelitian diatas, maka penelitian ini akan bertujuan untuk menguji serta mempertanyakan bagaimana pemahaman komunitas Gusdurian Surakarta tentang etika politik Gus Dur dan mengenai bagaimana peran dari komunitas ini dalam menyebarkan gagasan etika politik Gus Dur. Tentu saja ini akan menjadi hal yang menarik, mengingat bahwa komunitas ini muncul dari seorang tokoh besar bangsa dan kondisi sosial-politik masyarakat kota Surakarta yang plural.

Kerangka Teori

Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani Kuno, "*ethos*", yang berarti tempat tinggal yang biasa, kandang, watak, akhlak, cara berfikir, perasaan, kebiasaan, dan sikap. Secara singkat etika ialah ilmu tentang adat kebiasaan (Bertens, 2000). Dalam KBBI etika memiliki tiga arti, *pertama*, etika ialah ilmu tentang baik dan buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. *Kedua*, etika merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak. Dan yang *ketiga*, etika adalah nilai mengenai benar dan salah

yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Garis besarnya adalah, etika merupakan ilmu tentang yang baik dan yang buruk sesuai dengan kebiasaan pada masyarakat.

Sedangkan politik secara bahasa juga berasal dari bahasa Yunani, "*polis*" yang memiliki arti kota atau negara. Dalam KBBI, politik juga memiliki tiga pengertian, *pertama* ilmu mengenai negara dan tata negara, *kedua* segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, dan *ketiga* kebijakan atau cara bertindak. Atau secara kasar, politik ialah ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional (Istadiyantha, 2014). Singkatnya, politik merupakan ilmu yang berhubungan dengan negara, baik dari segi pengelolaan, kebijakan, tindakan, dan bahkan mengenai penguasaan.

Dalam hal ini, etika dan politik disatukan menjadi sebuah rumpun keilmuan etis yang bertindak sebagai panduan dalam berpolitik. Karena etika merupakan ilmu pengetahuan normatif terhadap segala tingkah laku manusia, bukan hanya secara teori, namun juga praktek secara langsung (Dewantara, 2017). Oleh sebab itu, etika dan politik harus memiliki relasi kuat untuk menjaga kondisi kesejahteraan masyarakat. Jika etika ditinggalkan dalam berpolitik, maka yang terjadi adalah kekacauan. Karena orientasi politik hanya disandarkan hanya pada kekuasaan dan keuntungan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, politik harus diselaraskan dengan etika agar arah menentukan kebijakan dapat mempertimbangkan akibat baik dan buruknya. Dengan ini tujuan-tujuan politis akan selaras dengan problem-problem sosial yang dihadapi masyarakat.

Penelitian ini akan menyandarkan landasan teori pada etika politik Gus Dur. Secara implisit Gus Dur membagi kerangka etika politiknya menjadi tigas aspek. *Pertama,* Gus Dur mendasarkan prinsip etikanya dengan pandangan kosmologi Islam mengenai status sosial manusia. Manusia memiliki tiga konsep dasar, yakni kedudukannya lebih tinggi dihadapan makhluk lainnya, status sebagai khalifah di bumi, dan keintelektualitasannya dalam merumuskan masalah dasar manusia (Wahid, 2007). Tiga konsep dasar tersebut diimplementasikan oleh Gus Dur dengan cara berpihak pada yang lemah, anti

diskriminasi dalam bentuk apapun, dan tidak pernah membenci sekalipun disakiti (Hamid, 2010). Oleh karena itu etika harus selaras dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, yakni untuk memanusiakan manusia.

Kedua, etika harus selaras dengan prinsip keadilan karena tujuan dari politik adalah kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasarkan pada Q.S. An-Nisa': 135 yang berisikan tentang tuntunan sebagai orang beriman harus dapat menegakkan keadilan. Keadilan merupakan prinsip universal yang dibutuhkan masyarakat, oleh karena itu tepat jika menjadikan keadilan sebagai salah satu prinsip dalam etika berpolitik. Karena dengan pejabat yang adil, maka masyarakat akan mendapatkan kesejahteraan.

Dan *terakhir,* Gus Dur dalam tulisannya yang berjudul "*Republik Bumi di Surga Sisi Lain Motif Keagamaan di Kalangan Gerakan Masyarakat*", menjelaskan bahwa untuk menegakkan kebenaran, dukungan harus diberikan kepada gerakan-gerakan revolusioner dalam upaya untuk memperjuangkan masyarakat yang adil dan demokratis (Wahid, 1999a). Perjuangan untuk menegakkan kebebasan dan menyempurnakan demokrasi harus terus digelorakan agar suara-suara yang muncul dari seluruh lapisan masyarakat tidak terbatasi oleh kekuatan-kekuatan anti demokrasi. Perjuangan ini dimulai dengan kesediaan menumbuhkan moralitas baru dalam kehidupan bangsa, yakni moralitas yang merasa terlibat dengan penderitaan rakyat di bawah. Menyadarkan para *political player* untuk tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Akan tetapi, menjadikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagai tujuan (Khasanah, 2018).

Gus Dur sangat menginginkan demokrasi berjalan secara utuh di Indonesia, tidak hanya bagai hiasan saja (Wahid, 1999b). Lembaga-lembaga pemerintahan bisa berjalan sesuai dengan aturan dan tidak melanggar undang-undang yang sudah disahkan, serta kebebasan bagi masyarakat dari berbagai kalangan untuk dapat mengemukakan pendapat mereka secara langsung tanpa ada penghalang. Demokrasi bagi Gus Dur bukan hanya sekedar terletak pada sistem dan lembaga-lembaga negara yang berdiri, namun juga orang-orang yang berkecimpung didalamnya juga harus paham mengenai cara berjalanya sebuah negara demokrasi. Maka oleh karena itu, demokrasi haruslah benar-

benar diperjuangkan dengan pengorbanan dan perjuangan yang sungguh-sungguh (Wahid, 1999b).

Menurut Serilis, Dkk. (Budiarjo, Andre, Yani, Ananda, and Nyipa, 2022) etika politik merupakan dimensi penting bagi masyarakat. Etika politik digunakan sebagi panduan bagi masyarakat untuk melegitimasi kekuasaan dan menjelaskan mengenai budaya politik yang ada. Panduan tersebut dapat berbentuk nilai-nilai yang meneguhkan tentang tanggung jawab manusia sebagai manusia, bukan hanya soal warga negara, negara, maupun hukum yang berlaku. Tentu peran etika politik disini menjadi vital sebagai alat kontrol masyarakat terhadap penguasa.

Oleh sebab itu, komunitas disini menjadi penyalur lidah untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat secara luas tentang bagaimana pentingnya mengerti tentang etika politik sebagai landasan teoritis dalam melihat sebuah situasi politik. Serta memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya etika dalam berpolitik, agar politik tidak hanya sebagai alat kekuasaan.

Beberapa poin itulah yang menjadi kerangka teori dalam memahami etika politik Gus Dur. Maka dalam penelitian ini akan mengkaji kualitas penggerak komunitas Gusdurian dalam memahami gagasan etika politik Gus Dur, serta bagaimana peran mereka dalam menyebarkan gagasan itu ke masyarakat luas.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif yang bersifat lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan wawancara yang bersifat tidak terstruktur, yang dilakukan dengan koordinator Gusdurian Surakarta ataupun tokoh-tokoh yang berkaitan. Observasi dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipan, dilakukan untuk mengamati secara langsung mengenai pemahaman dari Gusdurian Surakarta tentang gagasan etika politik Gus Dur beserta peran yang dilakukan dalam upaya menyebarkan gagasan

tersebut. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan melihat serta mencatat suatu laporan yang sudah ada. Disamping itu, penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui buku, artikel, jurnal, dan beberapa sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dari data yang sudah diperoleh, kemudian disatukan dan disusun untuk memperoleh satu pemahaman yang sama antar para penggerak Gusdurian Surakarta baik secara lisan maupun kegiatan. Setelahnya, data dianalisis secara mendalam untuk menjadi sebuah kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Lahirnya Gusdurian Surakarta

Secara nasional komunitas Gusdurian terbentuk atas inisiasi dari putri sulung Gus Dur, Alissa Wahid. Pada tahun 2010, ia mengajak para intelektual dan tokoh-tokoh yang akrab dengan Gus Dur untuk berkumpul di kediamannya untuk bermusyawarah. Musyawarah ini didasarkan atas keresahan atas hilangnya ketokohan seorang Gus Dur di negara ini. Oleh karena itu dirasa perlu untuk memperjuangkan kembali nilai-nilai yang dibawa oleh Gus Dur. Alissa mengungkapkan bahwa ia sadar bahwa dirinya hanya sebatang lidi yang akan mudah patah jika sendiri, oleh karena itu perlu untuk mengumpulkan lidi-lidi lain agar dapat kuat dan tidak mudah dipatahkan. Dengan filosofi sapu lidi itulah terbentuknya komunitas Gusdurian (Firdausi, 2022).

Pembentukan komunitas ini diawali dengan mengumpulkan berbagai sumber dan warisan Gus Dur untuk ditelaah kembali dan dicari nilai-nilainya. Hasilnya, terumuskanlah "Sembilan Nilai Utama Gus Dur" yang menjadi pegangan bergerak komunitas. Sembilan nilai utama ini ialah ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, persaudaraan, sikap ksatria, dan kearifan tradisi. Pada akhirnya komunitas Gusdurian resmi dideklarasikan pada tahun 2012 di rumah Alissa Wahid, Yogyakarta. Hingga saat ini komunitas Gusdurian berkembang pesat sampai 155 komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia.

Prinsip kerja yang ada dalam komunitas Gusdurian adalah integritas, independensi, anti-kekerasan, keberpihakan pada kelompok yang lemah, transparansi, anti-diskriminasi, kesetaraan gender, anti-penindasan, dan bersifat ekologis (Fitrian, 2022). Secara struktur, komunitas ini bergerak di daerah masing-masing dengan terpusat pada Sekretariat Nasional (SekNas) yang ada di Jakarta. Satu syarat untuk bergabung dalam komunitas ini ialah orang yang tertarik dengan sosok Gus Dur.

Komunitas Gusdurian muncul di Surakarta lewat K.H. Dian Nafi yang ikut menghadiri pertemuan yang diadakan pada tahun 2010. Seperti yang disampaikan oleh Ajie Najmuddin:

> "Saat itu diadakan pertemuan di Ciganjur, mengundang tokoh-tokoh yang merupakan teman-teman Gus Dur. Kalau dari Solo itu ada K.H. Dian Nafi. Pertemuan itu berbicara mengenai upaya untuk merumuskan bagaimana perjuangan Gus Dur dapat dilanjutkan" (Ajie Najmuddin, 2023).

Berangkat dari situ, K.H. Dian Nafi mengajak Ajie Najmuddin untuk membentuk dan menggerakkan komunitas Gusdurian di Surakarta. Hingga pada tahun 2015, Ajie Najmuddin yang ditunjuk sebagai koordinator penggerak Gusdurian Surakarta dihubungi oleh SekNas untuk mengadakan kegiatan dalam rangka peringatan hari toleransi nasional. Pada akhirnya, kegiatan pertama yang dilakukan oleh Gusdurian Surakarta ialah kampanye perdamaian di *Car Free Day* jalan Slamet Riyadi pada hari minggu, 1 Februari 2015. Aksi tersebut dijalankan Ajie Najmuddin dengan menggandeng kawan-kawan PMII dan IPNU IPPNU kota Surakarta untuk.

Gusdurian Surakarta sempat vakum karena ketidakjelasan struktur organisasi. Hingga kembali aktif pada tahun 2018-an dan tetap eksis hingga hari ini di tengah-tengah dinamika sosio-politik masyarakat kota Surakarta. Komunitas Gusdurian Surakarta hari ini diisi oleh penggerak dari berbagai latar belakang dengan tujuan yang sama, yakni untuk memperjuangkan kembali nilai-nilai Gus Dur.

Pemahaman Para Penggerak

Para penggerak Gusdurian Surakarta ketika ditanya perihal tentang etika politik Gus Dur pasti akan selalu mengaitkannya dengan realita kondisi Indonesia hari ini. Seperti

banyak pejabat yang korup, praktik politik identitas, dan ketidaketisan para politisi untuk saling menjegal dalam kontestasi. Karena pada dasarnya memang pemikiran-pemikiran Gus Dur merupakan pembacaan dari kondisi realitas Indonesia kala itu dan masih relevan hingga saat ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Ahmad Rodhif Hafidz dalam diskusi Haul Gus Dur ke-14 yang diadakan oleh Gusdurian Surakarta:

> "Buah gagasan tidak boleh jauh dari realitas yang ada dan terjadi di masyarakat, karena jika lepas dari hal tersebut bukan tidak mungkin akan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Selain realitas, Gus Dur juga menempatkan spiritualitas sebagai dasar dari gagasan-gagasannya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa Gus Dur merupakan seorang tokoh yang lahir dari kalangan pesantren dan ada di lingkungan ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Budaya politik yang tertanam di bangsa ini adalah politik yang culas, politik yang hanya berorientasi untuk menang, politik yang mengandalkan uang untuk menuju kekuasaan, dan budaya politik yang ketika sudah berkuasa akan bertindak sewenang-wenang. Pembicaraan mengenai nilai semakin langka dan menjadi hal yang mahal untuk dibicarakan. Karena anak muda sekarang tidak berpegang pada nilai dan menganggap nilai-nilai dalam kehidupan itu tidak penting. Kebanyakan orang sekarang berorientasi pada uang, jabatan dan kekuasaan. Maka, penggerak-penggerak Gusdurian yang masih berpegang pada nilai harus memperjuangkan nilai-nilai Gus Dur dalam lingkungannya masing-masing untuk memberi teladan mengenai nilai-nilai kehidupan agar generasi kedepannya tidak jauh dari adanya sebuah nilai" (Hafidz, 2023).

Aulia, perwakilan Sekretariat Nasional Jaringan Gusdurian yang hadir dalam tersebut menambahkan bahwa dalam memahami realitas, kearifan lokal juga patut menjadi pusat perhatian. Sebagai berikut:

> "Gus Dur selalu menggaungkan mengenai lokalisasi bukan globalisasi. Dimana budaya-budaya lokal harus dipertahankan dan dirawat dengan baik agar tidak tercabut dari akarnya. Maka sebagai bangsa yang berbudaya, masyarakat harus mencintai kebudayaan yang sudah diturunkan secara turun temurun oleh leluhur bangsa Indonesia. Untuk menjadi bangsa yang besar, harus tau mengenai akar budaya dan jati diri dari bangsa Indonesia" (Aulia, 2023).

Menjaga sebuah tradisi lokal sama saja dengan menjaga identitas diri masyarakat. Karena tradisi memiliki pengaruh kuat bagi suatu kelompok sosial menunjukkan jati dirinya dihadapan dunia. Maka dirasa perlu untuk terus merawat tradisi lokal di berbagai

wilayah Indonesia. Bagi para penggerak Gusdurian Surakarta, Gus Dur juga dikenal lewat kecintaannya terhadap tradisi dan seni. Melalui kecintaannya terhadap pewayangan dan juga karya seni, Gus Dur dapat melihat realitas politik secara lebih manusiawi karena berpegang pada nilai-nilai lokal. Seperti apa yang dituturkan oleh Suro Aji:

> "Gus Dur melihat banyak situasi politik melalui karya sastra. Seperti pada saat situasi politik tahun 1990-an akhir menjelang lengsernya Orde Baru, Gus Dur mengibaratkan kondisi tersebut seperti pada novel Trilogi Pendekar Rajawali karya Jin Yong yang dianggap sama pada bagian seri terakhir yang berjudul "Kisah Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga" (Aji, 2023).

Selanjutnya, para penggerak Gusdurian Surakarta juga mengkaitkan etika politik Gus Dur dengan sembilan nilau utama Gus Dur yang menjadi pegangan komunitas ini. Bagi Suro Aji sembilan nilai utama tersebut merupakan langkah politis Gusdurian, seperti penjelasannya sebagai berikut:

> "Sembilan nilai tersebut berkaitan erat dengan etika politik Gus Dur. Karena adanya sembilan nilai utama Gus Dur merupakan sebuah langkah politik yang dimiliki oleh komunitas Gusdurian untuk menentukan arah geraknya. Seperti Gusdurian selalu berbicara mengenai toleransi, Gusdurian membicarakan persamaan hak, dan Gusdurian yang harus bersikap ketika ada diskriminasi, merupakan sebuah langkah politis yang tidak bisa dilepaskan dari etika politik Gus Dur" (Aji, 2023).

Argumen yang hampir sama disampaikan oleh Kusnul Latifah, sebagai berikut:

> "Apabila penguasa tidak mempunyai prinsip dan nilai, maka negara akan menjadi tidak jelas. Maka untuk menjadi penguasa yang baik harus berdasarkan pada nilai. Nilai yang dimiliki Gus Dur sudah jelas ada sembilan. Nilai tersebut berasal dari nilai spiritualitas yang berdasarkan realitas" (Latifah, 2023).

Karena memang sembilan nilai utama yang sudah dirumuskan oleh para tokoh dan dijadikan sebagai panduan bergerak komunitas memiliki relasi yang kuat untuk membentuk sebuah iklim politik yang etis. Sembilan nilai utama tersebut antara lain, ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kesatriaan, dan kearifan tradisi. Selanjutnya, penggerak Gusdurian Surakarta memberikan dua pandangannya mengenai etika politik Gus Dur yang

berkaitan erat dengan memanusiakan manusia dan demokrasi yang berkeadilan. Seperti apa yang disampaikan oleh Suro Aji:

> "Ketika berbicara mengenai etika politik Gus Dur maka akan ada suatu prinsip yang melekat pada beliau, yakni mengenai konstitusi dan kemanusiaan. Karena politik harus berprinsip. Seperti apa yang digagas oleh Mahatma Ghandi yang mengklasifikasikan jenis kejahatan dalam tujuh dosa sosial, salah satunya politik tanpa prinsip" (Aji, 2023).

Dan sekali lagi selaras dengan penggerak Gusdurian Surakarta lainnya, yakni Ajie Najmuddin, yang mengungkapkan:

> "Dalam kehidupan nyata Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang memiliki karakter konsisten menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan bernegara. Ini karakter yang berimplikasi pada kehidupan pribadinya dan yang di sekelilingnya. Sering kali ia dicap sebagai musuh penguasa dan bahkan terkadang terkesan nyleneh di mata para pengikutnya. Tulisan yang ia sajikan kebanyakan tak jauh dari tema kemanusiaan. Menurut Gus Dur, topik yang menarik perhatiannya bukanlah politik atau filsafat yang dipelajari sebagai sesuatu yang abstrak, melainkan bagaimana agar mempunyai sifat manusiawi" (A. Najmuddin, 2017).

Jelas bahwa disini para penggerak Gusdurian Surakarta mengerti betul mengenai arah perjuangan Gus Dur kala itu. Dengan mencoba memahami realitas dengan bersandar pada spiritualitas dan lokalitas, maka akan jelas dan kokoh perjuangan yang akan dilakukan. Prinsip kemanusiaan, keadilan, dan tegaknya demokrasi dalam etika politik Gus Dur selaras dengan apa yang dipahami oleh kawan-kawan penggeran. Lebih lagi Suro Aji menjelaskan bahwa:

> "Keadilan bagi Gus Dur adalah yang sudah termuat dalam konstitusi yang berbentuk Undang-Undang Dasar dan Pancasila, maka itulah yang harus dijalankan. Dan jika memang setelah itu terdapat Undang-Undang yang dirasa diskriminatif dan bertolak belakang dengan Pancasila, maka harus direvisi, diganti, atau bahkan dihapuskan" (Aji, 2023).

Gus Dur secara nyata memberikan contoh mengenai bagaimana politik dijalankan secara etis. Dengan memanusiakan manusia, maka keadilan akan tercapai. Dan dengan tercapainya keadilan dan manusia yang memanusiakan, maka menegakkan demokrasi

bukanlah perkara yang sulit. Perlu diingat bahwa yang menjadi problem bukan hanya instansi, melainkan sumber daya manusianya. Pola pikir dan orientasi politik di Indonesia harus disandarkan pada kesadaran akan kesejahteraan masyarakat.

Maka, kekhawatiran soal prinsip perjuangan berbeda dapat ditepis dengan penjelasan dari para kawan-kawan penggerak Gusdurian Surakarta di atas. Selanjutnya, dengan berbekal pemahaman mendalam akan etika politik Gus Dur, diharapkan iklim sosial politik di Surakarta akan terus adem-ayem dan tidak banyak konflik terjadi di kota ini. Para penggerak Gusdurian Surakarta harus memiliki peran aktif dalam merawat kebhinnekaan dan persatuan yang ada di kota Surakarta tanpa ada kepentingan lain. Karena pada dasarnya, komunitas Gusdurian tidak bergerak dalam ranah politik praktis, namun juga tidak menghalangi pilihan politik masing-masing penggerak, asalkan tidak mengatasnamakan sebagai Gusdurian.

Peran dalam Menyebarkan Gagasan Etika Politik Gus Dur

Sejak awal didirikan memang fokus dari komunitas ini ialah merawat dan memperjuangkan kembali nilai-nilai Gus Dur. Oleh karena itu, komunitas Gusdurian Surakarta yang hari ini eksis sebagai komunitas sosial-kemasyarakatan, memiliki peran penting dalam menjaga dan menyebarkan semua gagasan-gagasan Gus Dur, terutama etika politik. Komunitas Gusdurian Surakarta bergerak sejalan dengan arahan yang diberikan oleh Sekretariat Nasional Jaringan Gusdurian. Mulai dengan menanggapi isu-isu lokal, nasional, maupun internasional. Sejak berdiri pada 2015, komunitas ini tetap pada jalurnya untuk terus menjaga nilai-nilai kemanusiaan, inklusivitas, dan demokrasi.

Selain reaksioner terhadap isu-isu hangat negara, komunitas ini juga memiliki kegiatan eventual yang dilakukan setiap tahunnya, yakni peringatan Haul Gus Dur. Kegiatan ini mulai rutin dilakukan setiap tahun sejak 2018. Peringatan Haul ini dilaksanakan yang pasti ialah untuk mendoakan Almarhum Gus Dur. Selain itu, dilain sisi kegiatan ini juga dilakukan dengan diskusi atau pementasan pertunjukkan seni seperi wayang, puisi, atau monolog untuk merefleksikan kembali gagasan-gagasan yang telah diperjuangkan oleh Gus Dur.

Menurut penuturan dari Ajie Najmuddin, peringatan terbesar yang dilaksanakan oleh Gusdurian Surakarta ialah pada tahun 2018, sebagai berikut:

> "Haul Gus Dur ke-9 merupakan kegiatan besar yang pernah diadakan oleh Gusdurian Surakarta. Pada saat itu serangkaian dimulai dengan kirab yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, selanjutnya acara dilanjut dengan puncak peringatan Haul yang diadakan di Lapangan Sriwedari, Kota Surakarta dengan mengundang K.H. Mustofa Bisri (Gus Mus) sebagai pembicara" (Ajie Najmuddin, 2023).

Kegiatan peringatan haul ini sempat tidak dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2022 karena sedang ada pembatasan akses dimana-mana karena masa pandemi Covid-19. Lalu pada tahun 2023 lalu, Sekretariat Nasional Jaringan Gusdurian mengusung tema "*Etika Demokrasi dalam Kepemimpinan Gus Dur*". Tema ini diambil karena mengingat kondisi bangsa yang sedang penuh gejolak menuju pemilu 2024, seperti apa yang disampaikan oleh Inayah Wahid dalam wawancara yang dilakukan oleh NU *Online*:

> "Tema itu menjadi sangat urgent hari ini. Kami melihat kondisi demokrasi di Indonesia hari ini diacak-acak seenaknya. Apakah orang-orang yang berkontestasi legal, menyalahi aturan? Mungkin tidak. Tapi apakah etis? Belum tentu. Itulah yang ingin kami munculkan." (Amaliyah, 2023b).

Jelas bahwa timbul keresahan tentang keetisan jalannya pemilu 2024, karena memang kondisinya banyak psywar dan adu domba yang membuat masyarakat terdikotomi pada pilihannya masing-masing.

Dalam peringatan haul Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan pada tanggal 16 Desember 2023 menghasilkan beberapa poin mengenai amanah untuk keberlangsungan pemilu 2024, amanah ini diberi nama "Amanat Ciganjur" yang berisikan 5 poin tentang bagaimana seharusnya pemilu 2024 berjalan (Amaliyah, 2023a). Poin-poin tersebut memberikan pesan kepada para politisi, penyelenggara, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga kondisi kondusifitas. Bahwa pemilu 2024 bukan hanya sebagai ajang saling berebut kekuasaan, namun juga sebagai sarana kemaslahatan bangsa yang berwujud dalam kesejahteraan masyarakat dan tegaknya keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi.

Lima poin "Amanat Ciganjur" tersebut juga dibawa dalam topik diskusi di peringatan Haul Gus Dur ke-14 yang dilaksanakan oleh komunitas Gusdurian Surakarta di nDalem Asyfariyah. Seperti biasa, acara Haul dimulai dengan tahlillan untuk mendoakan Gus Dur, selanjutnya disambung dengan *monolog dramatic reading* oleh Kelompok Bermain Bakat dan pagelaran wayang jemblung oleh Ki Riwus dan Ki Arko. Menuju akhir sesi, acara diselingi dengan diskusi mengenai etika demokrasi Gus Dur yang dipantik oleh Ahmad Rodif Hafidz dan Rahmad Hendro.

Selain kegiatan tahunan, Gusdurian Surakarta juga sering mengadakan diskusi. Tema-tema yang diangkat dalam diskusi biasanya yang sedang hangat terjadi atau ingin bernostalgia dengan seorang Gus Dur. Diskusi ini dibentuk dengan konsep yang lebih interaktif, seperti bedah buku, nonton bareng, dan dialog interaktif. Tujuan dari adanya diskusi ini tentu saja untuk menggali lebih dalam konstruk pemikiran Gus Dur untuk kemudian dikaji secara kritis dan direlevansikan kembali pada kondisi saat ini.

Beberapa judul dikusi yang berkaitan dengan etika politik sebagai berikut: *Lubang di Sepanjang Jalan Solo-Purwodadi* (2023), *Menelisik Keunikan dan Keberagaman Kota Solo* (2021), *Islam,Kekerasan dan Terorisme* (2021), *Seni Tradisi: Pandemi dan Semangat Pembaharuan* (2021), *Gus Dur dan Tionghoa* (2020), *Jelang Satu Sura: Refleksi Sosial-Budaya Bangsa* (2019), *Gus Dur dan Kewarganegaraan Bhineka: Melacak Role Model Penanganan Kasus Aceh dan Papua* (2019), *Gus Dur dan Bung Mahbub: Dua Wajah Intelektual NU* (2019), *Gus Dur dan Pancasila* (2019), *Tanah, Kebudayaan dan Kemanusiaan* (2019), *Gus Dur dan Demokrasi: Membaca Indonesia Pasca Pemilu* (2019), *Politik Kebangsaan Ala Gus Dur* (2019), *Situasi Nasional Saat Ini* (2018), *NU Garis Gus Dur* (2018), dan masih banyak lagi.

Terakhir, komunitas Gusdurian Surakarta juga menampakkan perannya melalui pengambilan sikap dan aksinya dalam berbagai isu sosial dan politik. Komunitas ini menolak praktik politik praktis, membela kelompok minoritas yang mengalami diskriminasi, serta aktif mempromosikan toleransi dan nilai-nilai kemanusiaan kepada masyarakat. Sikap ini diambil sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Gus Dur dalam

prinsip-prinsipnya memperjuangkan tegaknya demokrasi dan masyarakat yang adil dan harmonis. Untuk mempertegas posisinya di kota Surakarta, komunitas Gusdurian Surakarta menggandeng beberapa komunitas dan organisasi seperti PMII, IPNU IPPNU, dan lain sebagainya. Selain itu, komunitas ini juga aktif menjalin kerja sama dengan Kesbangpol dan komunitas lintas agama dalam upaya menjaga toleransi atas keberagaman yang ada di Surakarta.

Kesimpulan

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, nampak bahwa para penggerak Gusdurian Surakarta paham mengenai alur gagasan etika politik Gus Dur secara teoritis maupun penerapannya. Oleh karena itu, memang betul jika komunitas ini menganggap dirinya sebagai anak ideologis Gus Dur. Pemahaman yang terbangun dalam komunitas ini sesuai dengan apa yang telah Gus Dur sampaikan dalam tulisan-tulisan maupun gerakan politiknya.

Komunitas Gusdurian Surakarta memahami bahwa suatu prinsip yang melekat dengan etika politik Gus Dur yaitu mengenai kemanusiaan dan demokrasi yang berkeadilan. Etika politik gagasan Gus Dur tidak jauh dari pembacaan realitas, sisi spiritualitas, dan unsur lokal yang dipertahankan. Bagi para penggerak Gusdurian Surakarta, Gus Dur sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam langkah politiknya. Beliau mengajarkan caranya memanusiakan manusia, dibuktikan melalui kebijakan-kebijakan politik yang beliau ambil. Gus Dur sangat menginginkan adanya demokrasi yang berkeadilan, karena keadilan Gus Dur adalah apa yang sudah termuat dalam konstitusi, yakni pancasila. Namun, negara demokrasi bukan hanya mengenai lembaga serta sistem yang diterapkan tetapi juga mengenai orang-orang yang menjalankan sistem tersebut.

Disisi lain, bagi para penggerak Gusdurian Surakarta, gagasan etika politik Gus Dur juga sudah tertuang dalam sembilan nilai utama Gus Dur yang menjadi prinsip dalam komunitas ini. Sembilan nilai utama tersebut saling berkaitan satu sama lain, diantaranya

ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kesatriaan, dan kearifan tradisi. Bagi para penggerak Gusdurian sembilan utama Gus Dur tersebut menjadi landasan dan digunakan sebagai langkah politis yang diambil dalam menjalani kehidupan politik. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya mengenai peran dan pemahaman Komunitas Gusdurian Surakarta atas etika politik Gus Dur. Perlu untuk kedepannya bagi peneliti yang berkenan untuk melanjutkan penelitian ini disarankan untuk menggali lebih dalam mengenai sistem politik di Indonesia, serta memberikan solusi praktis terbaik untuk perpolitikan bangsa ini.

Referensi

Aji, S. (2023). *Wawancara Pribadi Tentang Pemikiran Gus Dur*.

Amaliyah, S. (2023a). Haul Ke-14 Gus Dur Telurkan Amanat Ciganjur untuk Penyelenggaraan Pemilu 2024. Retrieved from https://nu.or.id/nasional/haul-ke-14-gus-dur-telurkan-amanat-ciganjur-untuk-penyelenggaraan-pemilu-2024-EfZe6

Amaliyah, S. (2023b). Ini Rangkaian dan Tema Haul Ke-14 Gus Dur 2023 di Ciganjur. Retrieved from https://www.nu.or.id/nasional/ini-rangkaian-dan-tema-haul-ke-14-gus-dur-2023-di-ciganjur-OiBLq#google_vignette

Aulia. (2023). *Wawancara Pribadi Tentang Pemikiran Gus Dur*.

Bertens, K. (2000). *Etika*. Jakarta: Gramedia.

Budiarjo, T., Andre, H., Yani, Y., Ananda, A. S., and Nyipa, Y. (2022). Etika Politik dalam Kehidupan Bermasyarakat Menurut Pandangan Machiavelli. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, *2*(1), 28–33.

Dewantara, A. W. (2017). *Filsafat Moral: Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*. Yogyakarta: PT. KANISIUS.

Firdaus, R. (2020). *Etika Berpolitik dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gusdur) dengan Relevansi Perkembangan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.* (Skripsi). UIN Raden Intan Lampung, Lampung.

Firdausi. (2022). Alissa Wahid: Filosofi Sapu Lidi Jadikan Gusdurian Tersebar di Seluruh Dunia. Retrieved from https://www.nu.or.id/nasional/alissa-wahid-filosofi-sapu-lidi-jadikan-gusdurian-tersebar-di-seluruh-dunia-iarnT

Fitrian, Z. (2022). *Perkembangan dan Kontribusi Komunitas Gusdurian di Banyumas (2013-2021)* (Skripsi). UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto., Purwokerto.

Hafidz, A. R. (2023). *Wawancara Pribadi Tentang Pemikiran Gus Dur*.

Hamid, M. (2010). *Gus Gerr Bapak Pluralisme & Guru Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.

Istadiyantha. (2014). Pengantar Politik Islam dan Islam Politik. *Jurnal CMES*, *7*(2), 185–201.
Kartika, I. M. (2015). Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Etika Politik di Indonesia. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra*, 1–9.
Khasanah, F. (2018). *Etika Gus Dur: Religius—Rasional* (Ist). Tangerang Selatan: Cinta Buku Media.
Kurniawan, A. (2023). Soloraya Masuk Daerah Rawan Konflik di Pemilu 2024, Ini Kata Kesbangpol Jateng. Retrieved from https://regional.espos.id/solopos-masuk-daerah-rawan-konflik-di-pemilu-2024-ini-kata-kesbangpol-regional-1737652
Latifah, K. (2023). *Wawancara Pribadi Tentang Etika Politik Gus Dur*.
Muammar. (2021). *Peran Komunitas Gusdurian dalam Menyebarkan Gagasan Toleransi Beragama di Kalangan Generasi Muda di Kota Makassar* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.
Najmuddin, A. (2017). GAGASAN : Pesan Kemanusiaan Warisan Gus Dur. Retrieved from https://kolom.solopos.com/gagasan-pesan-kemanusiaan-warisan-gus-dur-881383
Najmuddin, Ajie. (2023). *Wawancara Pribadi tentang Kemunculan Komunitas Gusdurian*.
Prabowo, I. K. (2021). *Peran Komunitas Jaringan Gusdurian Ciputat dalam Menjaga Toleransi serta Pluralisme* (Skripsi). Universitas Negeri Jakarta, Jakarta.
Pureklolon, T. T. (2020). Pancasila sebagai Etika Politik dan Hukum Negara Indonesia. *Law Review*, *20*(1), 71. https://doi.org/10.19166/lr.v20i1.2549
Utama, V. R. (2020). *Menjerat Gus Dur*. Jakarta Pusat: PT. NUmedia Digital Indonesia.
Wahid, A. (1999a). *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS.
Wahid, A. (1999b). *Tuhan Tidak Perlu Dibela*. Yogyakarta: LKiS.
Wahid, A. (2007). *Islam Kosmopolitan, Nilai-Nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute.